

LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

*PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI*

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Kota BANDUNG

<TAHUN>

# IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Bandung

Unit Pengelola Program Studi : <Nama Fakultas / Sekolah>

Jenis Program : <Sarjana / Magister / Doktor / Profesi>

Nama Program Studi : <Nama Program Studi>

Alamat : <Alamat Program Studi>

Nomor Telpon : <No Telepon Program Studi>

E-mail dan Website : spm@itb.ac.id , http://www.itb.ac.id/

Nomor SK Pendirian PT 1) : Peraturan Pemerintah No. 6/1959

Tanggal SK Pendirian PT : 28 Februari 1959

Pejabat Penandatangan

SK Pendirian PT : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA – SOEKARNO
MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAJAAN - PRIJONO

Nomor SK Pembukaan PS 2) : <Nomor SK Pembukaan PS>

Tanggal SK Pembukaan PS : <Tanggal SK Pembukaan PS>

Pejabat Penandatangan

SK Pembukaan PS : <Nama Pejabat>

Tahun Pertama Kali

Menerima Mahasiswa : <Tahun>

Peringkat Terbaru

Akreditasi PS : <Peringkat Akreditasi>

Nomor SK BAN-PT : <No SK BAN PT>

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Program | Nama Program Studi | Akreditasi Program Studi | Jumlah mahasiswa saat TS4) |
| Status/ Peringkat | No. dan Tgl. SK | Tgl.Kadaluarsa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |  |

Keterangan:

1) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

2) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.

3) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.

4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

# IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama : ......................................................................

NIDN : ......................................................................

Jabatan : ......................................................................

Tanggal Pengisian : DD-MM-YYYY

Tanda Tangan :

Nama : ......................................................................

NIDN : ......................................................................

Jabatan : ......................................................................

Tanggal Pengisian : DD-MM-YYYY

Tanda Tangan :

Nama : ......................................................................

NIDN : ......................................................................

Jabatan : ......................................................................

Tanggal Pengisian : DD-MM-YYYY

Tanda Tangan :

Nama : ......................................................................

NIDN : ......................................................................

Jabatan : ......................................................................

Tanggal Pengisian : DD-MM-YYYY

Tanda Tangan :

Nama : ......................................................................

NIDN : ......................................................................

Jabatan : ......................................................................

Tanggal Pengisian : DD-MM-YYYY

Tanda Tangan :

Nama : ......................................................................

NIDN : ......................................................................

Jabatan : ......................................................................

Tanggal Pengisian : DD-MM-YYYY

Tanda Tangan :

# KATA PENGANTAR

<Isi Kata Pengantar>

<Isi Kata Pengantar>

<Isi Kata Pengantar>

<Isi Kata Pengantar>

<Isi Kata Pengantar>

# RINGKASAN EKSEKUTIF

<Maksimum 5 halaman>

<Isi Ringkasan Eksekutif>

<Isi Ringkasan Eksekutif>

<Isi Ringkasan Eksekutif>

<Isi Ringkasan Eksekutif>

# DAFTAR ISI

[IDENTITAS PENGUSUL i](#_Toc105485292)

[IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI iii](#_Toc105485293)

[KATA PENGANTAR v](#_Toc105485294)

[RINGKASAN EKSEKUTIF vi](#_Toc105485295)

[DAFTAR ISI vii](#_Toc105485296)

[BAB I. PENDAHULUAN 1](#_Toc105485297)

[A. DASAR PENYUSUNAN 1](#_Toc105485298)

[B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA 1](#_Toc105485299)

[C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN LED 1](#_Toc105485300)

[BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI 2](#_Toc105485301)

[A. KONDISI EKSTERNAL 2](#_Toc105485302)

[B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 2](#_Toc105485303)

[C. KRITERIA 4](#_Toc105485312)

[C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 4](#_Toc105485313)

[C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 5](#_Toc105485314)

[C.3 Mahasiswa 6](#_Toc105485315)

[C.4 Sumber Daya Manusia 7](#_Toc105485316)

[C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana 9](#_Toc105485317)

[C.6 Pendidikan 10](#_Toc105485318)

[C.7 Penelitian 12](#_Toc105485319)

[C.8 Pengabdian kepada Masyarakat 13](#_Toc105485320)

[C.9 Luaran dan Capaian Tridharma 15](#_Toc105485321)

[D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI 17](#_Toc105485322)

[BAB III. PENUTUP 18](#_Toc105485327)

# BAB I. PENDAHULUAN

<Maksimum 10 Halaman>

Laporan Evaluasi Diri berisi keseluruhan evaluasi diri UPPS dan program studi yang diakreditasi. Keberadaan UPPS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja di masing-masing perguruan tinggi. Pendahuluan ini berisi penjelasan tentang dasar penyusunan, tim penyusun, dan mekanisme kerja penyusunan LED.

## A. DASAR PENYUSUNAN

Bagian ini menjelaskan kebijakan tentang penyusunan evaluasi diri di perguruan tinggi dan tujuan penyusunan LED. Pada bagian ini, UPPS perlu dan harus menunjukkan keterkaitan LED dengan rencana pengembangan perguruan tinggi.

## B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA

Bagian ini menjelaskan keberadaan tim penyusun LED yang ditugasi oleh UPPS beserta deskripsi tugasnya. Keberadaan tim penyusun dan tugasnya harus ditunjukkan dengan dokumen formal yang disahkan oleh Ketua UPPS, dalam hal ini Dekan atau Ketua Jurusan/ Departemen untuk Universitas/Institut, atau Direktur untuk Politeknik, atau Ketua untuk Sekolah Tinggi, atau yang setingkat. Susunan tim penyusun LED harus melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna, dan mitra).

## C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN LED

Bagian ini menjelaskan mekanisme pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data, identifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan UPPS. Penjelasan tentang mekanisme kerja perlu disertai dengan jadwal kerja tim yang jelas.

# BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

## A. KONDISI EKSTERNAL

<Maksimum 10 hal>

Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan kondisi eksternal program studi yang terdiri atas lingkungan makro dan lingkungan mikro di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Lingkungan makro mencakup aspek kebijakan, ekonomi, sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, sumber pendanaan, perkuliahan daring (e-learning, pendidikan jarak jauh), kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, dan kemitraan. UPPS perlu menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi/keberadaan dan pengembangan UPPS dan program studi yang diakreditasi. UPPS perlu menyampaikan rumusan strategi pengembangan program studi secara umum yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat, yang akan dijabarkan lebih rinci pada Bagian D tentang Program Pengembangan.

## B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

<Maksimum 10 hal>

Bagian ini memuat deskripsi mengenai sejarah UPPS, visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai, struktur organisasi, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja UPPS yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang terpenting. Aspek yang harus dijelaskan pada bagian ini meliputi:

### 1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

Bagian ini berisi penjelasan UPPS tentang riwayat pendirian dan perkembangan UPPS dan program studi yang diakreditasi secara ringkas namun jelas.

### 2. Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai

Bagian ini berisi penjelasan singkat visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai yang diterapkan di UPPS dan program studi yang diakreditasi(visi keilmuan/*scientific vision*).

### 3. Organisasi dan Tata Kerja

Bagian ini memuat informasi terkait dokumen formal organisasi dan tata kerja yang berlaku, termasuk uraian secara ringkas tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok, dan fungsinya (tupoksi) di lingkup UPPS dan program studi yang diakreditasi.

### 4. Mahasiswa dan Lulusan

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang jumlah mahasiswa dan lulusan di program studi yang diakreditasi, termasuk kualitas masukan, prestasi akademik dan non-akademik terbaik yang dicapai mahasiswa dan lulusan, serta kinerja lulusan.

### 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) di program studi yang diakreditasi, kecukupan, kinerja, dan prestasi terbaik yang pernah dicapai.

### 6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, sarana dan prasarana di UPPS dan program studi yang diakreditasi.

### 7. Sistem Penjaminan Mutu

Bagian ini memuat penjelasan implementasi Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan di tingkat perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Penjelasan sebaiknya berdasar siklus PPEPP yang dilakukan oleh UPPS dan program studi yang diakreditasi, termasuk pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.

### 8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

Bagian ini memuat penjelasan tentang luaran dan capaian yang paling diunggulkan oleh UPPS dan program studi yang diakreditasi. Penjelasan disertai dengan tabel bukti luaran dan capaian dan/ atau tautan dokumen digital yang diunggah dalam repositori daring.

## C. KRITERIA

<Perhatikan agar total halaman ≤150 halaman>

Pada bagian ini, Tim Penyusun perlu merujuk kepada standar yang tepat sehingga dapat menjelaskan isi setiap kriteria dengan benar. Untuk memudahkan penyebutan standar yang harus dirujuk, digunakan singkatan sebagai berikut:

1. SN-Dikti: Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
2. Standar-PT: standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai pelampauan SN-Dikti dan/atau yang tidak ditetapkan di SN-Dikti
3. Standar-Dikti: standar pendidikan tinggi yang meliputi SN-Dikti dan Standar-PT.

Setiap standar mempunyai sejumlah indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian standar tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian SN-Dikti. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) adalah indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian Standar-PT yang ditetapkan di luar IKU.

Pada beberapa kriteria di bawah ini digunakan istilah DTPR. DTPR adalah dosen tetap penghitung rasio yang merupakan dosen tetap institusi yang ditugaskan mengajar mata kuliah inti yang sesuai dengan kompetensinya di program studi yang diakreditasi.

### C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian tujuan (VMTS) UPPS.

Standar-PT yang harus dirujuk adalah standar perguruan tinggi yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan program studi yang diakreditasi (PS).

#### 1.1. Penetapan

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup:

1. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
2. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
3. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNI level 8.

#### 1.2. Pelaksanaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup:

1. Ketercapaian VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
2. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
3. Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNI level 8.

#### 1.3. Evaluasi

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu- kenali praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS.

#### 1.4. Pengendalian

Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.

#### 1.5. Peningkatan

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.

### C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti terkait Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran,
2. Standar Pengelolaan Penelitian, dan
3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

#### 2.1. Penetapan

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama yang mencakup:

1. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek:
2. Kredibel.
3. Transparan.
4. Akuntabel.
5. Bertanggung jawab.
6. Adil.
7. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.
8. Kebijakan terkait pengembangan kerjasama.
9. Kebijakan terkait fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.

#### 2.2. Pelaksanaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup:

1. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.
2. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.
3. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal.

#### 2.3. Evaluasi

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu- kenali praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.

#### 2.4. Pengendalian

Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

#### 2.5 Peningkatan

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

### C.3 Mahasiswa

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar-PT yang berkaitan dengan mahasiswa.

Standar-PT yang harus dirujuk adalah standar perguruan tinggi yang berkaitan dengan mahasiswa dari UPPS dan program studi yang diakreditasi (PS).

#### 3.1. Penetapan

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup:

1. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.
2. Sistem layanan kepada mahasiswa.
3. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

#### 3.2. Pelaksanaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup:

1. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa, sesuai Tabel 3.1.
2. Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.
3. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

#### 3.3. Evaluasi

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.

#### 3.4. Pengendalian

Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

#### 3.5. Peningkatan

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

### C.4 Sumber Daya Manusia

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti terkait sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (tendik).

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

1. Standar Dosen dan Tendik,
2. Standar Peneliti, dan
3. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

#### 4.1. Penetapan

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:

1. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).
2. Pengembangan DTPR.
3. Pengembangan tenaga kependidikan.
4. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR:
5. menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.
6. menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
7. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.
8. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom
9. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

#### 4.2. Pelaksanaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:

1. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi, sesuai Tabel 4.1.
2. Pengembangan DTPR.
3. Pengembangan tenaga kependidikan, sesuai Tabel 4.2. LKPS.
4. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR:
5. menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.
6. menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
7. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.
8. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom.
9. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. Penjelasan disertai dengan tabel bukti luaran dan capaian dan/ atau tautan dokumen digital yang diunggah dalam repositori daring.

#### 4.3. Evaluasi

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu- kenali praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.

#### 4.4. Pengendalian

Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

#### 4.5. Peningkatan

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

### C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti terkait keuangan, sarana, dan prasarana yang digunakan untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran,
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian,
3. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM,
4. Standar Sarpras untuk Pembelajaran,
5. Standar Sarpras untuk Penelitian, dan
6. Standar Sarpras untuk PkM.

#### 5.1. Penetapan

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana mencakup:

1. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma. disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas belajar mandiri (graduate room).

#### 5.2. Pelaksanaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana yang mencakup:

1. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma, sesuai dengan Tabel 5.1.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka, termasuk fasilitas belajar mandiri (graduate room), sesuai dengan Tabel 5.2 LKPS dan Tabel 5.3 LKPS.

#### 5.3. Evaluasi

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu- kenali praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.

#### 5.4. Pengendalian

Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

#### 5.5. Peningkatan

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

### C.6 Pendidikan

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran.

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

1. Standar Isi Pembelajaran,
2. Standar Proses Pembelajaran, dan
3. Standar Penilaian Pembelajaran.

#### 6.1. Penetapan

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup:

1. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
2. Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.
3. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.
4. Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.
5. Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
6. Mekanisme proses penyelesaian tesis.

#### 6.2. Pelaksanaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup:

1. Proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan meliputi kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
2. Proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.
3. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.
4. Proses integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.
5. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
6. Mekanisme proses penyelesaian tesis.

#### 6.3. Evaluasi

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu- kenali praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

#### 6.4. Pengendalian

Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

#### 6.5. Peningkatan

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.

### C.7 Penelitian

Kriteria ini mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan penelitian.

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

1. Standar Isi Penelitian,
2. Standar Proses Penelitian, dan
3. Standar Penilaian Penelitian.

#### 7.1.Penetapan

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR yang mencakup:

1. Keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.
2. Dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.
3. Mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
4. Mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

#### 7.2. Pelaksanaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR yang mencakup:

1. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS.
2. Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.
3. Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian.
4. Pelaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

#### 7.3. Evaluasi

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu- kenali praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR, termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.

#### 7.4. Pengendalian

Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

#### 7.5. Peningkatan

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

### C.8 Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

1. Standar Isi PkM,
2. Standar Proses PkM, dan
3. Standar Penilaian PkM.

#### 8.1. Penetapan

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup:

1. Keberadaan lembaga/unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM.
2. Dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.
3. Mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.
4. Mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM.

#### 8.2. Pelaksanaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan kegiatan PkM mencakup:

1. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM.
2. Pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal
3. hingga laporan akhir.
4. Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.
5. Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.

#### 8.3. Evaluasi

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu- kenali praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.

#### 8.4. Pengendalian

Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR

#### 8.5. Peningkatan

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.

### C.9 Luaran dan Capaian Tridharma

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

1. Standar Kompetensi Lulusan,
2. Standar Hasil Penelitian, dan
3. Standar Hasil PkM.

#### 9.1. Penetapan

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi mencakup:

1. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.
2. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.
3. Penelitian: jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.
4. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.
5. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).
6. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.
7. PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

#### 9.2. Pelaksanaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana di Tabel 9.1, Tabel 9.2, Tabel 9.3, Tabel 9.4 mencakup:

1. Pendidikan: Pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.
2. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.
3. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.
4. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.
5. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).
6. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.
7. PkM: Jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)

#### 9.3. Evaluasi

Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu- kenali praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

#### 9.4. Pengendalian

Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

#### 9.5. Peningkatan

Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

## D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI

<Perhatikan agar total halaman ≤ 150 halaman>

### 1. Analisis capaian kinerja

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan hasil analisis capaian kinerja dari setiap kriteria. Aspek- aspek analisis antar kriteria yang mencakup kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah. Analisis harus didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta konsisten dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria di atas.

### 2. Analisis SWOT atau analisis lain yang relevan

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan hasil analisis SWOT/analisis lainnya yang relevan tentang kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya dengan hasil analisis capaian kinerja. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan program studi yang diakreditasi, serta menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan menetapkan program pengembangan.

### 3. Strategi pengembangan

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan kemampuan UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan. Strategi dan program pengembangan perlu memperhatikan prioritas sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan VMT UPPS secara keseluruhan, terutama pengembangan program studi yang diakreditasi.

### 4. Program Keberlanjutan

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan dapat dijamin keberlangsungannya. Penjelasan yang disampaikan juga harus berisi jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.

# BAB III. PENUTUP

<Maksimum 2 Halaman>

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat kesimpulan akhir dari Laporan Evaluasi Diri